

Judul : KPK : Kartu Prakerja Belum Rugikan Negara
Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

KPK: Kartu Prakerja Belum Rugikan Negara

■ NAWIR ARSYAD AKBAR,
DIAN FATH RISALAH

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firdi Bahuri mengatakan, hingga saat ini belum ada keuangan negara yang hilang dari program Kartu Prakerja. Saat ini, kelanjutan program itu pun masih ditunda hingga hari ini.

"Belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja, belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," ujar Firdi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (25/6).

Ia mengatakan, KPK telah menyerahkan data dan kajian terkait Kartu Prakerja kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. "Alhamdulillah pemerintah, beliau-beliau

dengarkan kata dan suara KPK, sehingga Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksanaannya," ujar Firdi.

Menurut Firdi, ini merupakan salah satu visi dan misi dari KPK di era kepemimpinannya. KPK ingin sebisa mungkin mencegah kerugian negara dan program pemerintah. "Kita menyelamatkan uang negara daripada kita menangkap seseorang, tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," kata Firdi.

Pekan lalu, KPK mengumumkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan tiga tahap program Kartu Prakerja, di antaranya terjadi konflik kepentingan antara penyelenggara dan penyedia konten, potensi kerugian negara akibat penggunaan anggaran yang tidak efisien, dan pembelian konten yang seharusnya bisa didapatkan gratis.

Sejumlah anggota Komisi III pun se-

belumnya mengkritisi program tersebut dan meminta evaluasi, bahkan dibentakan. Namun, pada saat rapat kemarin, anggota Komisi III seperti enggan membahas masalah itu.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, M Rudy Salahuddin, sebelumnya menyatakan gelombang IV program itu belum dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan rekomendasi KPK. Ia juga menyebut, pembayaran pada platform penyedia jasa pelatihan belum dilakukan karena menunggu audit pihak terkait.

Dalam rapat itu, Firdi juga mengajukan anggaran sebesar Rp 1,881 triliun untuk 2021. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp 955,08 miliar.

Kebutuhan anggaran itu, kata dia, salah satunya dipengaruhi alih status

pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). "KPK akan alih status dari pegawai KPK menjadi ASN. Tentu, hal ini akan memengaruhi dukungan anggaran," ujar Firdi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, usulan penambahan anggaran akan dibahas dalam rapat internal agar segera dapat diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Akan kita bawa dalam rapat internal Komisi III. Keputusan hasil rapat internal itu akan kami sampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis untuk disinkronisasikan," kata Sahroni.

Rapor merah

Di tempat terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) memberikan rapor merah kepada KPK. Nilai te-

rendah itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPK era Firdi Bahuri es periode Desember 2019-Juni 2020.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan, KPK Jilid V merupakan era yang paling suram. Terlebih, KPK kini diisi oleh lima komisioner yang kebijakannya kerap menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

"Proses tata kelola organisasi pun menjadi problematika baru di lembaga antirasuah ini. Begitu pula pada aspek penindakan dan pencegahan, yang mana juga tidak menunjukkan perkembangan signifikan dibanding kepemimpinan sebelumnya. Kombinasi seperti ini tentu hanya akan menafikan ekspektasi publik terhadap kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," ujar Kurnia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/6). ■ *(dian fath)*